

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021  
(Belanja Langsung)  
s/d Bulan Maret  
BIRO TATA PEMERINTAHAN**

| No  | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu       | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |  |
|-----|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|--|---|--|
|     |                 |  |            | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |  |   | Deviasi  |
| 1   | 2.12.02         | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | 49.518.000 | 41,57  | 39,58     | 1,99    | 20.570.000  | 41,54      | 16.970.000     | 34,27         | 7,27   |                          |  |   |  |
| 1.1 | 2.12.02.1.01.02 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 24.868.000 | 35,4   | 35,4      | 0       | 8.720.000   | 35,07      | 8.070.000      | 32,45         | 2,61   | DIY                      | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk  | Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran) : 0 dokumen dari 50 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan</li> <li>2. Persiapan kegiatan raker penduduk rentan</li> <li>3. Koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota dan Dinas Sosial DIY untuk persiapan kegiatan raker penduduk rentan</li> <li>4. Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk panti yang akan difasilitasi</li> <li>5. Terlaksananya kegiatan raker penduduk rentan dengan mengundang beberapa panti asuhan di DIY, Dinas Dukcapil Kab/Kota dan Dinas Sosial DIY &amp; Kab/Kota</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya dokumen pendukung untuk pengajuan dokumen kependudukan penduduk rentan</li> <li>2. Akibat pandemi Covid-19, koordinasi dengan instansi terkait menjadi kurang optimal</li> <li>3. Efisiensi honor narasumber pada raker penduduk rentan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalin koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil sehingga mempermudah dalam pengumpulan data panti asuhan</li> <li>2. Terjalinnya dukungan dengan panti-panti yang menjadi target penerbitan dokumen kependudukan tahun 2021</li> </ol> |
| 1.2 | 2.12.02.1.01.04 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan  | 24.650.000 | 47,8   | 43,8      | 4       | 11.850.000  | 48,07      | 8.900.000      | 36,11         | 11,97  | DIY                      | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan | Instansi yang memanfaatkan data kependudukan : 0 instansi dari 3 instansi   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan 2021</li> <li>2. Tersusunnya jadwal rencana kegiatan tahun 2021</li> <li>3. Persiapan kegiatan raker pemanfaatan data kependudukan</li> <li>4. Terlaksananya raker pemanfaatan data kependudukan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>  |

|     |                 |   |             |       |       |      |             |       |             |       |      |     |   |   |  |
|-----|-----------------|---|-------------|-------|-------|------|-------------|-------|-------------|-------|------|-----|---|---|--|
|     |                 |   |             |       |       |      |             |       |             |       |      |     |   |   | 1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak 2. Dengan terbitnya permendagri 102 tahun 2019 tentang Pemanfaatan data kependudukan maka perlu penyesuaian kembali terkait metode akses bagi instansi pengguna 3. Efisiensi hidangan makan dan minum 4. Efisiensi transport peserta raker karena peserta yang hadir banyak yang berstatus ASN  |
| 2   | 2.12.03         | PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | 192.738.000 | 59,62 | 59,62 | 0    | 114.910.000 | 59,62 | 104.770.000 | 54,36 | 5,26 |     |   |   | <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi online dan kerjasama yang baik melancarkan kegiatan 2. kesadaran dari OPD di Pemda DIY terkait pentingnya pemanfaatan data kependudukan</p>   |
| 2.1 | 2.12.03.1.01.04 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota      | 192.738.000 | 59,62 | 59,62 | 0    | 114.910.000 | 59,62 | 104.770.000 | 54,36 | 5,26 | DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | <p>KTP-el yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu : 0 KTP dari 200 KTP</p> <p>Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/ Kota se-DIY : 0 kali dari 2 kali</p> <p>KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu : 0 KIA dari 100 KIA</p> <p>Blanko KIA : 10000 keping dari 10000 keping</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan</li> <li>2. Proses penyediaan barang/jasa</li> <li>3. Tersedianya blangko KIA</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi online dan kerjasama yang baik melancarkan kegiatan</p>   |
| 3   | 2.12.04         | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN             | 190.861.000 | 28,93 | 24,36 | 4,57 | 56.224.000  | 29,46 | 43.594.000  | 22,84 | 6,62 |     |   |   |  |
| 3.1 | 2.12.04.1.02.02 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 118.590.000 | 27,3  | 20,3  | 7    | 33.060.000  | 27,88 | 22.580.000  | 19,04 | 8,84 | DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | <p>Masyarakat yang memahami Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak : 200 orang dari 1000 orang</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan</li> <li>2. Persiapan kegiatan Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015</li> <li>3. Pemilihan materi dan narasumber</li> <li>4. Terlaksananya sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015 dengan peserta dari Kota Yogyakarta</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak</p> <p>2. Efisiensi pada kegiatan sosialisasi Perda 9 terkait honor narasumber dan uang transport peserta, karena kebanyakan yang hadir berstatus ASN</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |

|     |                 |  |            |       |       |   |            |       |            |       |       |     |  |   |   |  |  |  |   |
|-----|-----------------|--|------------|-------|-------|---|------------|-------|------------|-------|-------|-----|--|---|---|--|--|--|---|
|     |                 |  |            |       |       |   |            |       |            |       |       |     |  |   |   |  |  |  | 1. Adanya inovasi dalam pelayanan adminduk di Kota Yogyakarta 2. Antusias tinggi dari masyarakat terkait informasi terbaru bidang administrasi kependudukan |
| 3.2 | 2.12.04.1.02.05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan  | 14.754.000 | 55,3  | 55,3  | 0 | 8.368.000  | 56,72 | 6.718.000  | 45,53 | 11,18 | DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan | Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY : 0 lembaga dari 5 lembaga       | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan</li> <li>2. Penyusunan materi kegiatan</li> <li>3. Persiapan kegiatan raker KIA</li> <li>4. Koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota terkait persiapan pelaksanaan raker</li> <li>5. Terlaksananya kegiatan raker KIA dengan mengundang Dinas Dukcapil Kab/Kota, instansi terkait dan mitra bisnis yang bergerak di dunia pariwisata</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akibat pandemi Covid-19, dukungan untuk kerjasama pemberian insentif anak pemegang KIA kurang optimal</li> <li>2. Efisiensi pada kegiatan raker KIA terkait honor narasumber dan uang transport peserta</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Adanya koordinasi dengan Dinas Dikpora terkait penyampaian informasi tentang KIA dan Dinas Pariwisata terkait informasi lokasi wisata yang akan diajak kerjasama pemberian insentif anak pemegang KIA</p> |  |  |  |   |
| 3.3 | 2.12.04.1.02.07 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 48.992.000 | 24,3  | 24,3  | 0 | 12.040.000 | 24,58 | 11.540.000 | 23,55 | 1,02  | DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan | Masyarakat yang sadar Adminduk : 100 orang dari 600 orang   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan</li> <li>2. Pemilihan materi untuk isi leaflet</li> <li>3. Pembuatan desain leaflet</li> <li>4. Persiapan pencetakan leaflet</li> <li>5. Leaflet tercetak</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akibat pandemi Covid-19, ada tempat wisata yang tergabung dalam PKS tutup sementara</li> <li>2. Efisiensi harga satuan leaflet</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Lembaga / tempat wisata yang tergabung dalam PKS sebagian besar memberikan insentif yang bisa dimanfaatkan anak pemegang KIA menjadi salah satu materi pada leaflet</p>  |  |  |  |   |
| 3.4 | 2.12.04.1.03.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     | 8.525.000  | 32,56 | 27,56 | 5 | 2.756.000  | 32,33 | 2.756.000  | 32,33 | 0     | DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan | Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan Adminduk di kabupaten/kota : 0 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan 2021</li> <li>2. Tersusunnya jadwal rencana kegiatan tahun 2021</li> <li>3. Terlaksananya koordinasi terkait progress perekaman KTP-el dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY melalui video conference zoom</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>   |  |  |  |   |

|     |                 |  |                    |             |             |          |                  |             |                  |             |             |     |  |   |  |  |  |   |
|-----|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----|--|---|--|--|--|---|
|     |                 |  |                    |             |             |          |                  |             |                  |             |             |     |  |   |  |  |  | Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi online dan kerjasama yang baik dari Dinas Dukcapil Kab/Kota<br>2. Ketepatan waktu Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam memberikan progress dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Adminduk |
| 3.5 | 2.12.04.1.03.02 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan** | 0                  | 20,87       | 20,87       | 0        | 0                | nan         | 0                | nan         | nan         | DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk  | Peningkatan Kapasitas Aparatur Adminduk di Kab/kota : 0 orang dari 130 orang<br>Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik : 0 jenis dari 3 jenis<br>Penyediaan blangko KTP-el bagi pelayanan di kab/kota : 48500 blangko dari 150000 blangko<br>Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik : 0 lembaga dari 20 lembaga<br><br>Peningkatan pemahaman kebijakan aminduk bagi masyarakat : 0 orang dari 90 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan 2021<br>2. Tersusunnya jadwal rencana kegiatan tahun 2021<br>3. Terlaksananya koordinasi dengan Kab/Kota dalam rangka sinkronisasi kegiatan tahun 2021<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak<br>2. Penyesuaian DPA DAK non fisik masih dalam tahap refocusing anggaran, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan<br>3. Adanya refocusing dan pemetaan terkait DAK non Fisik juga menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi online dan kerjasama yang baik melancarkan pelaksanaan kegiatan |  |  |   |
| 4   | 2.12.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>   | <b>173.900.000</b> | <b>5,36</b> | <b>5,36</b> | <b>0</b> | <b>9.665.000</b> | <b>5,56</b> | <b>8.537.309</b> | <b>4,91</b> | <b>0,65</b> |     |  |   |  |  |  |   |
| 4.1 | 2.12.05.1.01.01 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi  | 115.550.000        | 7,1         | 7,1         | 0        | 8.515.000        | 7,37        | 7.387.309        | 6,39        | 0,98        | DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan | Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan : 0 konten dari 2 konten  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan 2021<br>2. Tersusunnya jadwal dan rencana kegiatan tahun 2021<br>3. Terlaksananya rapat koordinasi terkait Pengembangan Sistem Informasi Konsolidasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota<br><br>4. Tersusunnya daftar inventarisasi data dalam pengembangan Sistem Informasi Konsolidasi<br><br><b>Faktor Penghambat:</b>   |  |  |   |

|     |                 |   |               |       |       |       |               |       |               |       |      |                                  |  |   |   |  |
|-----|-----------------|---|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|------|----------------------------------|--|---|---|--|
|     |                 |   |               |       |       |       |               |       |               |       |      |                                  |  |   |   | <p>1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak 2. Penyesuaian kembali table database konsolidasi dengan database pusat terkait Rencana implementasi SIAK online Terpusat dari Ditjen Dukkapol kemendagri</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi online dan kerjasama yang baik dari Dinas Dukkapol Kan/Kota 2. Pemeliharaan yang baik dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kab/Kota sehingga proses rencana integrasi dalam pengembangan konsolidasi provinsi diharapkan berjalan dengan lancar</p> |
| 4.2 | 2.12.05.1.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 58.350.000    | 1,91  | 1,91  | 0     | 1.150.000     | 1,97  | 1.150.000     | 1,97  | 0    | DIY                              | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan | Profil perkembangan kependudukan : 0 dokumen dari 1 dokumen   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan 2021<br/>2. Tersusunnya jadwal rencana kegiatan tahun 2021<br/>3. Terlaksananya koordinasi inventarisasi data awal dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi online dan kerjasama yang baik melancarkan semua proses kegiatan 2. Pelaporan data dari Dinas Dukkapol Kab/Kota yang tepat waktu sehingga proses kompilasi data diharapkan berjalan dengan baik</p> |  |
| 5   | 2.22.08         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                       | 563.679.000   | 0     | 0     | 0     | 0             | 0     | 0             | 0     | 0    |                                  |  |   |   |  |
| 5.1 | 2.22.08.1.06.03 | Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan                                     | 563.679.000   | 0     | 0     | 0     | 0             | 0     | 0             | 0     | 0    |                                  |  |   |   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>   |
| 6   | 4.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                   | 7.721.924.049 | 21,41 | 21,7  | -0,29 | 1.624.122.199 | 21,03 | 1.153.942.000 | 14,94 | 6,09 |                                  |  |   |   |  |
| 6.1 | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 58.885.750    | 16,5  | 25,67 | -9,17 | 9.716.000     | 16,5  | 8.566.000     | 14,55 | 1,95 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha   | Kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah : 0 Berita Acara dari 1 Berita Acara<br>Dokumen perencanaan perangkat daerah : 0 dokumen dari 10 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Inventarisasi standar belanja umum dan standar belanja khusus<br/>2. Menyusun refocusing anggaran tahun 2021 yang dituangkan dalam DPPA TA 2021 sesuai Surat PIt. Kepala BPKA DIY No. 911/01780/PKD tanggal 15 Maret 2021</p>  |  |

|     |                 |   |               |       |      |      |               |       |               |       |      |                                  |  |  |   |   |
|-----|-----------------|---|---------------|-------|------|------|---------------|-------|---------------|-------|------|----------------------------------|--|--|---|---|
|     |                 |   |               |       |      |      |               |       |               |       |      |                                  |  |  |   | 3. Melakukan input refocusing anggaran Tahun 2021 di SIPD dan anggaran kas di SIPD sesuai SE Plt. PPKD No. 911/01921/PKD tanggal 19 Maret 2021.<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya koordinasi tatap muka sehingga kurang optimal<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi online (dengan whatsapp dan telepon) dan kerjasama yang baik antar bagian sehingga data yang diperlukan dapat tersedia |
| 6.2 | 4.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**  | 208.498.000   | 0     | 0    | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 0    | 0                                | DIY  | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil  | Dokumen RKA DAK bidang adminduk : 0 dokumen dari 1 dokumen<br>Aparatur yang meningkat kapasitasnya dalam perencanaan dan penganggaran DAK bidang adminduk : 0 orang dari 60 orang   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 6.3 | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | 13.505.000    | 0     | 0    | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 0    | 0                                | DIY  | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil  | Laporan penyelenggaraan adminduk : 0 dokumen dari 12 dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 6.4 | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 12.162.000    | 58,64 | 55   | 3,64 | 7.132.000     | 58,64 | 6.081.000     | 50    | 8,64 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Nilai LKJIP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY : 0 poin dari 86 poin<br>Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK : 55 % dari 100 % | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pengumpulan bahan<br>2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020<br>3. Penyampaian LKJIP kepada Biro Organisasi.<br>4. Rapat monev internal Biro .<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PPKM sehingga menyebabkan berkurangnya koordinasi tatap muka (rapat koordinasi), sehingga belanja makan minum rapat ada yang tidak terserap<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi online (zoom, whatsapp, telpon) dan mencari data langsung ke pelaksana |   |
| 6.5 | 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 5.664.865.049 | 23,6  | 23,6 | 0    | 1.332.902.927 | 23,53 | 1.002.177.828 | 17,69 | 5,84 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Pembayaran gaji ASN Biro Tata Pemerintahan Setda DIY : 0.25 tahun dari 1 tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyusunan Data Gaji ASN Biro Tata Pemerintahan<br>2. Penyusunan Data Tambahan Penghasilan ASN Biro Tata Pemerintahan<br>3. Pembayaran Gaji ASN Biro Tata Pemerintahan sampai dengan bulan Maret 2021  |   |

|     |                 |   |             |       |       |    |            |       |            |       |       |                                  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|---|-------------|-------|-------|----|------------|-------|------------|-------|-------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                 |   |             |       |       |    |            |       |            |       |       |                                  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 4. Pembayaran Tambahan Penghasilan sampai dengan bulan Maret 2021.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya pegawai purna tugas per 1 Februari dan adanya pejabat yang belum terisi, sehingga penyerapan anggaran kurang optimal, namun hak pegawai sudah terbayarkan 100%<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>tersedianya fasilitas untuk melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan |
| 6.6 | 4.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | 144.121.250 | 24,4  | 24,4  | 0  | 35.091.272 | 24,35 | 25.660.572 | 17,8  | 6,54  | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Administrasi pekantor yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu : 3 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyusunan Data Tugas ASN<br>2. Penyusunan Dokumen Pihak Ketiga<br>3. Pembayaran Pihak Ketiga sampai dengan bulan Maret 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>terdapat risiko kesalahan jumlah atau tujuan pembayaran<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>tersedianya fasilitas untuk melakukan pembayaran pihak ketiga  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 2.913.000   | 100   | 100   | 0  | 2.913.000  | 100   | 2.824.000  | 96,94 | 3,06  | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun : 1 laporan dari 1 laporan                              | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pengumpulan bahan input aplikasi keuangan<br>2. Rapat penyusunan Laporan keuangan<br>3. Penyusunan laporan keuangan tahunan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya pemberlakuan PPKM, pertemuan luring dibatasi sehingga realisasi makanan dan minuman rapat tidak optimal<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antar bagan sehingga data laporan keuangan bisa didapat walaupun tanpa pertemuan   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.620.000   | 30,75 | 31,75 | -1 | 778.000    | 29,69 | 478.000    | 18,24 | 11,45 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Dokumen Laporan Bulanan dan Dokumen Laporan Semesteran : 0 laporan dari 14 laporan           | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pengumpulan bahan<br>2. Penyusunan dokumen pelaporan keuangan bulanan (SPJ Fungsional) sampai dengan bulan Maret 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Adanya pemberlakuan PPKM sehingga Koordinasi penyusunan laporan keuangan dilakukan tanpa membuat forum secara fisik<br>2. Efisiensi hidangan rapat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antar bagian dan pelaksana kegiatan sehingga data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan dapat tersedia tanpa ada pertemuan fisik, inventarisasi data dengan whatshap dan telepon. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 4.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | 1.889.000   | 0     | 0     | 0  | 0          | 0     | 0          | 0     | 0     | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Dokumen Laporan Prognosis : 0 laporan dari 1 laporan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |                 |  |             |       |      |       |           |       |           |       |      |   |                                  |   |  |  |  |  |  |                        |
|------|-----------------|--|-------------|-------|------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------------|
|      |                 |  |             |       |      |       |           |       |           |       |      |   |                                  |   |  |  |  |  |  | Faktor Pendukung:<br>- |
| 6.10 | 4.01.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**                       | 409.846.000 | 0     | 0    | 0     | 0         | 0     | 0         | 0     | 0    | 0 | DIY                              | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | Sosialisasi program aminduk melalui media cetak dan elektronik : 0 jenis dari 3 jenis<br>Peningkatan pemahaman kebijakan aminduk bagi masyarakat : 0 orang dari 90 orang | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>-<br>Faktor Penghambat:<br>-<br>Faktor Pendukung:<br>-  |  |  |  |                        |
| 6.11 | 4.01.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**     | 166.552.000 | 0     | 0    | 0     | 0         | 0     | 0         | 0     | 0    | 0 | DIY                              | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Kapasitas Aparatur Adminduk di Kab/kota : 0 orang dari 130 orang   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>-<br>Faktor Penghambat:<br>-<br>Faktor Pendukung:<br>-  |  |  |  |                        |
| 6.12 | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.298.000   | 25,6  | 25,6 | 0     | 1.549.000 | 24,6  | 1.118.000 | 17,75 | 6,84 |   | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha            | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 3 jenis dari 8 jenis   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>1. Tersedianya data kebutuhan komponen listrik<br>2. Tersedianya kebutuhan komponen listrik sampai dengan bulan Maret 2021<br>Faktor Penghambat:<br>terdapat risiko ketidaksesuaian antara komponen listrik yang dianggarkan dan komponen yang dibutuhkan<br>Faktor Pendukung:<br>Dukungan dari bagian yang lain sehingga komponen yang dibutuhkan dapat tersedia, tersedianya fasilitas untuk melakukan pengadaan kebutuhan komponen listrik                                       |  |  |  |                        |
| 6.13 | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 35.021.000  | 24,33 | 24,6 | -0,27 | 8.630.000 | 24,64 | 8.350.000 | 23,84 | 0,8  |   | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha            | Alat Tulis Kantor : 10 jenis dari 34 jenis<br><br>Tabung pemadam kebakaran yang terisi : 0 tabung dari 11 tabung   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>1. Data Kebutuhan Alat Tulis Kantor<br>2. Data Tabung pemadam kebakaran<br>3. Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor sampai dengan Bulan Maret 2021<br>4. Penyediaan tanaman hias berupa tanaman anggrek sampai dengan Bulan Maret 2021.<br>Faktor Penghambat:<br>terdapat risiko ketidaksesuaian antara alat tulis kantor yang dianggarkan dan data ATK yang dibutuhkan<br>Faktor Pendukung:<br>Koordinasi dengan pelaksana kegiatan sehingga ATK yang dibutuhkan dapat terpenuhi |  |  |  |                        |
| 6.14 | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 5.017.000   | 28,4  | 28,4 | 0     | 1.423.000 | 28,36 | 1.423.000 | 28,36 | 0    |   | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha            | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih : 6 jenis dari 15 jenis   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>1. Tersedianya data kebutuhan peralatan kebersihan<br>2. Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan sampai dengan bulan Maret 2021<br><br>Faktor Penghambat:  |  |  |  |                        |



|      |                 |  |             |     |     |   |             |       |            |       |       |                                  |  |   |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|-------------|-----|-----|---|-------------|-------|------------|-------|-------|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
|      |                 |  |             |     |     |   |             |       |            |       |       |                                  |  |   |  |  |  |  | Peralatan kebersihan yang dianggarkan tidak mencukupi/sesuai dengan yang dibutuhkan<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>tersedianya fasilitas untuk melakukan pengadaan kebutuhan peralatan kebersihan, koordinasi dengan pelaksana kegiatan sehingga peralatan kebersihan yang dibutuhkan dapat tersedia |
| 6.15 | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 27.973.000  | 27  | 27  | 0 | 7.562.000   | 27,03 | 7.562.000  | 27,03 | 0     | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha   | Dokumen Hasil Penggandaan : 789 lembar dari 50000 lembar<br>Barang Cetak : 6 unit dari 13 unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya dokumen hasil penggandaan sampai dengan bulan Maret<br><br>2. Tersedianya barang cetakan sampai dengan bulan Maret<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya perubahan nomenklatur kelembagaan sehingga dokumen hasil penggandaan dan cetak yang sudah ada perlu diperbaiki<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>tersedianya fasilitas untuk membuat dokumen hasil penggandaan dan barang cetakan  |  |  |  |  |
| 6.16 | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 527.706.000 | 25  | 25  | 0 | 109.661.000 | 20,78 | 7.347.100  | 1,39  | 19,39 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha   | Laporan tindak lanjut hasil rapat koordinasi : 3 bulan dari 12 bulan<br>Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi : 3 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pelaksanaan rapat koordinasi sampai dengan Bulan Maret 2021<br><br>2. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sampai dengan Bulan Maret 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Dengan pemberlakuan PPKM dampak covid-19, Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi koordinasi luar daerah dibatasi sehingga realisasi kurang maksimal<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan konsultasi koordinasi menggunakan fasilitas online (zoom, whatshap dan telepon) |  |  |  |  |
| 6.17 | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**                            | 64.074.000  | 0   | 0   | 0 | 0           | 0     | 0          | 0     | 0     | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan | Peralatan Kantor sesuai RKBMD : 0 jenis dari 3 jenis<br>Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD : 0 jenis dari 1 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |  |  |  |
| 6.18 | 4.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 55.259.000  | 100 | 100 | 0 | 55.259.000  | 100   | 51.974.000 | 94,06 | 5,94  | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha   | Peralatan Kantor sesuai RKBMD : 3 jenis dari 3 jenis<br>Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD : 1 jenis dari 1 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyelesaian laporan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sulitnya ketersediaan barang sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, dan adanya efisiensi anggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b>   |  |  |  |  |

|      |                 |  |               |       |       |       |             |       |             |       |       |                                  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|----------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|      |                 |  |               |       |       |       |             |       |             |       |       |                                  |  |   |   |  |  |  |  |  | Perizinan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor mudah diperoleh, dukungan dari bagian-bagian lain sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia. Adanya efisiensi anggaran. |
| 6.19 | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 110.070.000   | 4,5   | 20,6  | -16,1 | 3.950.000   | 3,59  | 3.950.000   | 3,59  | 0     | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Jasa Surat-Menyurat : 3 jenis dari 3 jenis<br><br>Penyediaan blangko KTP-el bagi pelayanan di kab/kota : 0 blangko dari 150000 blangko  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya kelengkapan surat menyurat (Perangko, Materai, dan benda pos lainnya) sampai dengan Bulan Maret 2021<br>2. Penyediaan surat kabar dan majalah sampai dengan Bulan Maret 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kekurangan jumlah atau jenis dalam pengadaan kelengkapan surat menyurat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersedianya fasilitas untuk melakukan pengadaan kelengkapan surat menyurat, koordinasi dengan bagian sehingga kebutuhan dapat terpenuhi          |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 151.959.000   | 25,1  | 25,1  | 0     | 36.665.000  | 24,13 | 18.070.500  | 11,89 | 12,24 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD : 0 unit dari 7 unit<br>Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKBMD : 0 unit dari 5 unit      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Melakukan penyusunan data Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua dan roda empat<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>BBM dan solar telah disiapkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, namun sampai akhir triwulan 1 belum ada penyerahan kendaraan dobel kabin dari OPD yang telah dijanjikan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersedianya fasilitas untuk melakukan penyusunan data Kendaraan Dinas/ Operasional roda dua dan roda empat sehingga operasional Biro dapat berjalan lancar |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 52.690.000    | 20,67 | 20    | 0,67  | 10.890.000  | 20,67 | 8.360.000   | 15,87 | 4,8   | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD : 3 bulan dari 12 bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Melakukan pemeliharaan peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD sampai dengan bulan Maret 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Banyaknya jenis barang yang harus dipelihara sehingga kadang ada kadang ada barang yang harus dipelihara tetapi mundur pemeliharaannya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya petugas pemeliharaan untuk peralatan kantor dan adanya buku kendali pemeliharaan   |  |  |  |  |  |  |
| 7    | 4.01.03         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  | 2.052.318.500 | 27,56 | 18,84 | 8,72  | 513.563.500 | 25,02 | 398.475.000 | 19,42 | 5,61  |                                  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 7.1  | 4.01.03.1.01.03 | Fasilitasi Penataan Wilayah  | 159.754.000   | 12,9  | 11,3  | 1,6   | 19.563.000  | 12,25 | 12.838.000  | 8,04  | 4,21  | Kota Yogyakarta                  | Bagian Pemerintahan Umum - Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan                           | Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan : 0 laporan dari 1 laporan<br>Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kabupaten/kota : 0 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>A. Pokja Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi  |  |  |  |  |  |  |

|     |                 |  |             |       |       |   |            |       |            |      |       |                 |   |  |   |   |
|-----|-----------------|--|-------------|-------|-------|---|------------|-------|------------|------|-------|-----------------|---|--|---|---|
|     |                 |  |             |       |       |   |            |       |            |      |       |                 |   |  | <p>Toponimi unsur warisan budaya : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>  | <p>- Terinformasikannya kegiatan, output kegiatan, dan jadwal pelaksanaan masing-masing output kegiatan pada masing-masing Kab/Kota sebagai anggota Pokja.</p> <p>B. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY :</p> <p>- Rapat Koordinasi Penyusunan buku kode dan data administrasi wilayah pemerintahan Kab/Kota di DIY</p> <p>- Disampaikannya Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 125/3850 tanggal 25 Februari 2021, Hal : Permohonan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2021</p> <p>- Data agar dikirimkan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY paling lambat tanggal 5 Maret 2021 melalui email : bangwil.diy@gmail.com atau melalui surat resmi</p> <p>-Tersusunnya buku kode dan data wilayah administrasi pemerintahan DIY tahun 2021</p> <p>C. Database Pilar Batas untuk Pengelolaan Batas Wilayah</p> <p>- Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan dan Rincian Anggaran Belanja (RAB)</p> <p>- Persiapan penunjukan pengadaan barang dan jasa</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-OPD terlambat menyampaikan data awal untuk penyusunan buku kode dan data administrasi wilayah pemerintahan Kab/Kota di DIY -Koordinasi tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena kondisi darurat bencana non alam ( covid 19) sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi internal bagian solid -Koordinasi dilakukan secara daring</p> |
| 7.2 | 4.01.03.1.02.02 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 320.217.000 | 40,03 | 40,03 | 0 | 79.524.000 | 24,83 | 23.188.000 | 7,24 | 17,59 | Kota Yogyakarta | Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri - Sub Bagian Otonomi Daerah | <p>Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan : 0 rekomendasi dari 1 rekomendasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penyusunan LPPD DIY Tahun 2020</p> <p>1. Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2020</p> <p>2. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2020</p> <p>3. Penyusunan LPPD Tahun 2020</p> <p>4. Entri Data LPPD Tahun 2020 dalam SILPPD</p> <p>4. LPPD Tahun 2020 telah Direviu oleh Inspektorat</p> <p>5. Tindak Lanjut Hasil Reviu LPPD Tahun 2020</p> |   |

|     |                 |   |             |      |       |      |             |       |             |      |      |                 |  |  |   |
|-----|-----------------|---|-------------|------|-------|------|-------------|-------|-------------|------|------|-----------------|--|--|---|
|     |                 |   |             |      |       |      |             |       |             |      |      |                 | 6. Penyampaian LPPD tahun 2020 kepada Presiden Melalui Mendagri<br><br>Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2020<br><br>1. Penyusunan Tim Penerapan SPM DIY<br>2. Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2020<br>3. Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2020<br><br>4. Entri Data dalam Aplikasi SPM Ditjen Bina Bangda<br>5. Penyampaian Laporan SPM DIY Tahun 2020 kepada Mendagri melalui Ditjen Bina Bangda<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Data yang disampaikan OPD berubah-ubah 2. Dokumen Pendukung belum ada pengesahan dan tanda tangan pejabat yang berwenang 3. Data dan Dokumen Pendukung yang disampaikan belum lengkap 4. Data masih menunggu rilis dari Kementerian/Lembaga. 5. Perubahan kebijakan dalam penyusunan LPPD oleh pusat sehingga tidak dilakukan cetak Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD sehingga anggaran tidak terserap. 6. Efisiensi makan minum karena kebijakan PPKM akibat covid19<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Adanya kerjasama yg baik antar opd sehingga data dukung lppd dapat tersedia dengan lengkap 2. Penguasaan terhadap TI oleh OPD Pengampu dan/ Tim Penyusun sehingga pergerakan data lebih mudah |  |   |
| 7.3 | 4.01.03.1.02.03 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 469.472.500 | 48,4 | 46,04 | 2,36 | 227.117.500 | 48,38 | 189.215.000 | 40,3 | 8,07 | Kota Yogyakarta | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren  | Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di DIY : 0 laporan dari 1 laporan<br>Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif : 0 laporan dari 1 laporan<br>Laporan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada : 1 laporan dari 1 laporan<br><br><br>Laporan Kecamatan dengan aparaturnya yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD) : 0 laporan dari 1 laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br>1. Berkas usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu<br><br>- Terdistribusikannya surat permohonan personil anggota Pokja Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan DPRD Kab/Kota Tahun 2021<br><br>- Tersusunnya Pokja Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan DPRD Kab/Kota Tahun 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu : 0 usulan SK dari 3 usulan SK</p> <p>Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY : 0 laporan dari 1 laporan</p> | <p>- Terbitnya Surat Gubernur DIY kepada Bupati Bantul, Nomor 177/6223, tanggal 29 Maret 2021 hal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantul , bahwa usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantul belum dapat diproses lebih lanjut karena terdapat berkas administrasi yang belum dapat dipenuhi.</p> <p>2. Laporan pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada</p> <p>- Terkoordinasikannya Persyaratan Administrasi Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada</p> <p>- Terkoordinasikannya Persiapan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 di DIY</p> <p>- Terkirimnya Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri:</p> <p>1. Surat Gubernur Nomor 131/1755, hal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2016-2022</p> <p>2. Surat Gubernur Nomor 131/1756, hal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2016-2022</p> <p>3. Surat Gubernur Nomor 131/1757, hal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2016-2022</p> <p>4. Surat Gubernur Nomor 131/1760, hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>5. Surat Gubernur Nomor 131/1761, hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>6. Surat Gubernur Nomor 131/1762, hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>- Terkoordinasikannya Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bantul, Gunungkidul dan Sleman</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



|     |                 |                                       |               |      |     |    |             |    |             |       |      |                 |   |   |  |  |
|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------|------|-----|----|-------------|----|-------------|-------|------|-----------------|---|---|--|--|
|     |                 |                                       |               |      |     |    |             |    |             |       |      |                 |   |   |  | <p>- Terlatihnya aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Sleman, Angkatan I dan II, pada tanggal 15 dan 16 Maret 2021</p> <p>- Terlatihnya aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa di Kota Yogyakarta, Angkatan I dan II, pada tanggal 17 dan 18 Maret 2021</p> <p>-Terlatihnya aparatur penyelenggara pemerintahan desa di tingkat Kecamatan dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dalam binwas terhadap Desa/Kelurahan pada tanggal 23 Maret 2021</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Koordinasi dan rapat kerja tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena kondisi darurat bencana non alam ( covid 19) sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran 2. Kondisi tanggap darurat yang diakibatkan bencana non-alam Covid-19 mengubah skema pelaksanaan yang semula akan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul diubah pelaksanaannya di Komplek Kepatihan dengan memperhatikan protokol dan pencegahan Covid-19 melalui pembagian dua kelas yang kemudian terhubung melalui aplikasi zoom, menjadi kurang efektif karena adanya kendala koneksi jaringan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1.Koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah berjalan dengan baik dan komitmen tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing 2. Komitmen Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa se-Kabupaten Kulon Progo serta sebagian Desa di Kabupaten Bantul untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur. 3. Kesediaan dan dukungan Pemerintah Desa serta BPD se Kabupaten Gunungkidul, Sleman ,serta Pemerintah Kota dan Kecamatan untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara dimaksud. 4. Dukungan narasumber dari berbagai latar belakang ketugasan dan fungsi masing-masing untuk hadir memberikan penguatan materi terhadap aparatur Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, Aparatur Kelurahan, LPMK serta Aparatur Kecamatan</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> |
| 7.4 | 4.01.03.1.03.01 | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | 1.102.185.000 | 17,2 | 2,2 | 15 | 187.359.000 | 17 | 173.234.000 | 15,72 | 1,28 | Kota Yogyakarta | Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri - Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri | Laporan Penyelenggaraan Forum Mitra Praja Utama di DIY : 0 laporan dari 1 laporan |  |  |





|               |                 |                               |                       |              |              |   |                      |             |                      |              |   |                 |   |  |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|----------------------|-------------|----------------------|--------------|---|-----------------|---|--|--|
| 8.1           | 4.01.10.1.01.10 | Pelaksanaan Kelembagaan Asli* | 1.705.476.000         | 0,18         | 0,18         | 0 | 1.275.000            | 0,07        | 1.275.000            | 0,07         | 0 | Kota Yogyakarta | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren | <p>Kajian Pemberdayaan Desa sebagai basis Keistimewaan DIY yang terintegrasi : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Hasil Analisa Pembangunan Sistem Informasi Kalurahan : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Laporan Hasil koodinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM Desa berbasis Keistimewaan DIY : 0 kalurahan dari 392 kalurahan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Laporan Hasil koodinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren</p> <p>- Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren</p> <p>2. Hasil Analisa Pembangunan Sistem Informasi Kalurahan</p> <p>- Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Analisa Pembangunan Sistem Informasi Kalurahan</p> <p>- Terkoordinasikannya rencana operasional pelaksanaan kegiatan Analisa Pembangunan Sistem Informasi Kalurahan melalui koordinasi dengan tim ahli teknologi informasi dan Pemerintah Kabupaten</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas SDM Desa berbasis Keistimewaan DIY</p> <p>- Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Desa berbasis Keistimewaan DIY</p> <p>4. Kajian Pemberdayaan Desa sebagai basis Keistimewaan DIY yang terintegrasi</p> <p>- Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Kajian Pemberdayaan Desa sebagai basis Keistimewaan DIY yang terintegrasi.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pandemi covid19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi SDM dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja 2. Kesiapan tenaga ahli untuk melaksanakan pra koordinasi terkait urgensi sistem informasi Kalurahan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                               | <b>12.650.414.549</b> | <b>19,14</b> | <b>17,83</b> |   | <b>2.340.329.699</b> | <b>18,5</b> | <b>1.727.563.309</b> | <b>13,66</b> |   |                 |   |  |  |